

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Berlakunya otonomi daerah, mengakibatkan daerah memiliki hak, wewenang dan kewajibannya dalam mengatur, mengurus, serta mempertanggungjawabkan secara mandiri urusan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya hal tersebut, pemerintah pusat mendelegasikan wewenangnya kepada pemerintah daerah. Pendelegasian wewenang tersebut disertai dengan adanya penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang terkait dalam kerangka desentralisasi fiskal. Kebutuhan akan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah daerah disebabkan oleh pendelegasian kewenangan dan penyerahan dana.

Penerapan akuntabilitas publik yang telah didorong oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dikarenakan meningkatnya tuntutan dari masyarakat. Akuntabilitas publik dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dilakukan secara periodik melalui media pertanggungjawaban yang telah ditetapkan sebelumnya (Mardiasmo, 2006).

Adanya bentuk pertanggungjawaban dan penyelenggaraan pemerintah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Sebagaimana terdapat dalam Al Qur'an surat An-Nahl ayat 93:

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَنُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Dalam surat tersebut menjelaskan bahwa “Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan”.

Hal tersebut diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bagian Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (KKAP, Lampiran I: par. 35-40) menjelaskan bahwa agar laporan keuangan dapat memenuhi tujuannya diperlukan karakteristik kualitas laporan keuangan, yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Laporan keuangan yang relevan yaitu apabila informasi yang disajikan akan mempengaruhi keputusan pengguna serta memberikan kemudahan dalam mengoreksi serta mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, dan dapat memprediksi masa yang akan datang.

Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu (*timeliness*) agar relevansi berlaku sesuai dengan apa yang diharapkan. Apabila informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material atau salah saji, seharusnya dengan menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi, hal tersebut dapat dikatakan sebagai laporan keuangan yang memiliki karakteristik yang andal. Laporan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan untuk pengambilan keputusan harus disajikan dengan proses yang memiliki jaminan keandalan dan ketepatan waktu dalam penyajian laporannya. Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Laporan keuangan pemerintah daerah yang ditur berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak hanya disusun untuk kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun, laporan keuangan pemerintah daerah yang memiliki peran sebagai wujud dari akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka komponen pelaporan yang di informasikan setidaknya mencakup jenis laporan atau elemen informasi. Laporan keuangan pada dasarnya merupakan informasi dari pihak manajemen yang diberikan kepada pihak yang berkepentingan mengenai kondisi atau keadaan keuangan pemerintah daerah yang pencatatannya telah sesuai dengan bagian keuangan (Zuliarti, 2012). Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang tercatat dalam laporan

keuangan pemerintah daerah harus memiliki manfaat khususnya bagi pemerintahan daerah itu sendiri dan juga harus sesuai dengan kebutuhan para pemakai (Arfianti, 2011).

Informasi akan lebih bermanfaat apabila informasi tersebut memiliki nilai yang bermakna yang terkandung didalamnya. Nilai tersebut diantaranya adalah keterandalan dan ketepatan waktu. Keterandalan dan ketepatan waktu merupakan dua unsur nilai informasi yang penting terkait dengan sebuah pengambilan keputusan berbagai pihak yang bersangkutan dan ikut serta dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Keterandalan merupakan asersi atau keyakinan yang diberikan kepada pihak lain bahwa informasi yang diberikan valid, benar keberadaannya, atau andal. Sedangkan ketepatan waktu merupakan tersedianya jarak waktu penyajian informasi yang diinginkan dengan frekuensi pelaporan informasi, sebelum informasi tersebut kehilangan nilai serta kekuatan yang mengakibatkan lemahnya informasi maka informasi harus disajikan dengan tepat waktu karena informasi tersebut juga untuk mempengaruhi kualitas keputusan yang telah dibuat (Suwardjono, 2005).

Demi tercapainya keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan yang baik, maka harus adanya sumber daya manusia yang berkualitas yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, pemanfaatan teknologi yang baik yang mampu memberikan kualitas yang baik dalam penggunaan sistem pelaporan keuangan. Kualitas Informasi dalam pembuatan laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang bekerja dengan baik dalam penyusunan laporan keuangan. Sumber daya manusia itu sendiri

merupakan kemampuan yang dimiliki oleh individu, lembaga atau organisasi yang memiliki kewenangan sesuai dengan fungsinya untuk mencapai sebuah tujuan tertentu secara efisien dan efektif. Orang yang siap dan mampu memberikan tenaga dan usahanya untuk mencapai sebuah tujuan tertentu dalam organisasional yaitu merupakan salah satu karakteristik sumber daya manusia (Hullah dan Budiarmo, 2012).

Keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah juga dapat dilihat dari pemanfaatan teknologi informasinya. Teknologi informasi itu sendiri, selain teknologi komputer untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran serta memperluas informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Indriasari dan Nahartyo, 2008). Pemanfaatan teknologi informasi akan meminimalisasi kesalahan-kesalahan yang terjadi pada bagian laporan keuangan, karena seluruh kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan akan tercatat secara terstruktur, maka dari itu akan mampu menyajikan laporan keuangan daerah yang andal.

Sumber daya manusia yang berkualitas, ditambah dengan pemanfaatan teknologi informasi yang tepat diharapkan dapat membantu dan memperlancar serta memberikan kemudahan dalam proses pelaporan keuangan pemerintah daerah yang memiliki keterandalan dan ketepatan waktu penyajiannya, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik dan berkualitas. Selain sumber daya manusia dan teknologi informasi, ada hal lain yang perlu diperhatikan dalam melakukan penyajian laporan keuangan, yaitu

pengendalian internal yang memiliki fungsi untuk mengatur mengenai teknik akuntansi yang dapat mempengaruhi terjadinya perubahan dalam pendekatan sistem akuntansi serta prosedur pencatatan, formulir yang digunakan, fungsi-fungsi otorisasi untuk tujuan pengendalian internal, laporan dan pengawasan. Fungsi dari pengendalian internal yaitu untuk membantu sumber daya manusia dalam meminimalisasi pekerjaan yang dilakukan, aturan serta hak yang perlu diketahui dalam bekerja, dan teknologi seperti apa yang dapat dimanfaatkan untuk memudahkan pekerjaannya.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi Keuangan Daerah, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat DPPKA adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Kepala SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) selaku PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) bertugas menyelenggarakan akuntansi tersendiri SKPKD serta mengkonsolidasikan laporan akuntansi dari seluruh SKPD. DPPKA bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah, dimana laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi

pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Fenomena pelaporan keuangan pada Laporan Keuangan pemerintahan daerah (SKPD) merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2013 mengalami peningkatan, baik dari segi realisasi maupun dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini dapat dilihat dari adanya efektivitas pendapatan pada tahun 2013 yang menunjukkan angka 102,19%, sedangkan tahun 2012 101,92%. Selain itu, untuk realisasi belanja pada tahun 2013 juga menunjukkan kinerja yang baik karena realisasinya lebih rendah dari yang dianggarkan yaitu sebesar 92,28%. Realisasi pendapatan yang lebih tinggi dari anggaran mengindikasikan bahwa kemampuan pemerintah dalam menghasilkan pendapatan baik, sedangkan realisasi belanja yang lebih rendah dari anggaran menunjukkan bahwa pemerintah mampu melakukan penghematan (bkad.kulonprogokab.go.id).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud untuk mengambil judul penelitian yaitu: “Dampak Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Keterandalan dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah” (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo).

B. Batasan Masalah Penelitian

Batasan masalah ini bertujuan untuk memberikan batasan yang paling jelas dari permasalahan yang ada untuk memudahkan pembahasan. Dari banyak faktor yang mempengaruhi keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah, maka dari itu penelitian yang dilakukan yaitu hanya membatasi variabel pada pengujian yaitu kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal pemerintah. Sampel dalam penelitian ini yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Kulon Progo, peneliti membatasi dengan memilih Badan dan Dinas dijadikan sampel dengan kriteria pengambilan sampel Kepala Sub Bagian Keuangan dan Staf Keuangan yang berada pada setiap SKPD.

C. Rumusan Masalah Penelitian

1. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah?
5. Apakah sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah?

6. Apakah sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
4. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.
5. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
6. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menguji kembali teori yang dilakukan oleh penelitian terdahulu sehingga mengetahui tentang pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah serta diharapkan dapat memberi masukan bukti empiris seberapa besar pengaruh variabel bebas (independen) terhadap keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah dan menambah ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat berguna bagi pemerintah yaitu untuk melakukan pertimbangan dalam pengambilan keputusan khususnya untuk bidang sektor publik yang berkaitan dengan pelaporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Kulon Progo.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi masyarakat mengenai pelaporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Kulon Progo.